

Judul : Impor kendaraan niaga, Komisi VI utamakan industri otomotif lokal
Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Impor Kendaraan Niaga

Komisi VI Utamakan Industri Otomotif Lokal

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyoroti rencana Pemerintah mengimpor 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Diingatkan, kebijakan impor harus dihitung secara komprehensif dampaknya terhadap industri nasional, tenaga kerja, dan struktur ekonomi dalam negeri.

Nurdin bilang, penguatan KDMP merupakan agenda strategis untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi rakyat. Namun, jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, maka Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

"Jangan sampai koperasi diperkuat, tetapi industri otomotif nasional justru kehilangan momentum," ujar Nurdin dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Diketahui, Pemerintah melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor sekitar 105 ribu mobil dari India untuk keperluan transportasi logistik KDMP. Mobil

tersebut berjenis pikap dan truk. Nilai pembelian mobil tersebut bisa mencapai triliunan rupiah.

Nurdin mengingatkan, kebijakan ini harus sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks itu, belanja negara seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja.

Dia bilang, koperasi adalah soko guru ekonomi nasional tetapi penguatannya tidak boleh bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. "Setiap rupiah belanja negara harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa," tegas politikus Golkar ini.

Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel menambahkan, rencana impor tersebut melanggar Asta Cita yang menjadi program pemerintahan Prabowo-Gibran. Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita



Nurdin Halid

Presiden, konsep Prabowoonomics, dan konsep Sumitronomics. "Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto," kata Gobel dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Gobel menekankan, fiskal dan BUMN harus menjadi instrumen pengungkit ekonomi dan industri nasional, apalagi di tengah ekonomi global yang sedang mengalami kelesuan. Melalui kekuatan fiskal dan BUMN, akan tercipta lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.

Dia mengingatkan, sesuai

janji kampanye. Pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang banyak di tengah pengangguran yang besar. Karena itu, fiskal dan BUMN harus mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut.

"Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Apalagi pengangguran terbesar adalah dari lulusan pendidikan vokasi," kata politikus Nasdem ini.

Sebenarnya, kata Gobel, industri otomotif di Indonesia telah mampu membuat produk otomotif dengan baik. Walau memang industri otomotif ini masih merupakan bagian dari industri otomotif pemilik merek di negara lain. Namun, kandungan dalam negerinya terus ditingkatkan dan juga telah dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia.

Yang harus diingat dalam prinsip pohon industri, beberapa, dari satu industri besar ada banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi penyokongnya. Apalagi industri otomotif di Indonesia telah memiliki jaringan after sales services yang baik di seluruh Indonesia.

"Ini yang menjadi jaminan

layanan purna jualnya," kata dia. Selain itu, PT Pindad juga telah mampu memproduksi mobil sendiri. Karena itu, pengadaan mobil untuk KDMP ini mestinya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya.

Sementara, Direktur Utama (Dirtu) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, keputusan untuk melakukan impor mobil pikap dari India karena produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan pengadaan tersebut. Sebab produksi lokal selama ini hanya sebanyak 70 ribuan. "Kalau kita ambil semua di lokal nanti mengganggu industri logistik dan lainnya," ucapnya, Jumat (20/2/2026).

Joao mengatakan, demi menjaga harmonisasi maka membuka ruang dan pilihan kepada masyarakat dengan alternatif-alternatif lain. "Sehingga kita bisa mendapatkan kendaraan dengan harga yang fair," ujar dia.

Sebagai informasi, berdasarkan data, total penjualan berbagai jenis mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit, di antaranya adalah jenis *pikap* yang mencapai 110.674 unit. ■ TIF